



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PERBAIKAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH DI SUMATERA UTARA MELALUI APBN

Rafika Sari Panjaitan
Analisis Legislatif Ahli Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Konektivitas jalan di wilayah Sumatera mengalami hambatan akibat kerusakan yang terjadi pada jalur sentra produksi dan jalur logistik di Sumatera yang telah berlangsung cukup lama. Kerusakan jalan tersebar di wilayah Sumatera Utara, sepanjang kawasan pantai timur Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Persoalan ini mengemuka setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan melihat ruas Jalan Gunting Saga-Teluk Binjai di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada tanggal 17 Mei 2023. Karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka selama ini pemerintah daerah (Pemda) cenderung melakukan perbaikan jalan secara parsial/tambal sulam dan seadanya. Akibatnya, jalan yang baru diperbaiki akan rusak kembali beberapa bulan kemudian. Bahkan di beberapa ruas jalan, warga berupaya memperbaiki jalan secara swadaya, tetapi akan kembali rusak karena tidak diperbaiki sesuai standar. Kerusakan jalan ini kemudian berlangsung selama bertahun-tahun.

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jalan rusak terparah di Indonesia. Kerusakan terjadi baik di jalan nasional, di jalan provinsi, maupun di jalan kabupaten/kota. Dari 2.600 kilometer jalan nasional di Sumatera Utara, ada 10% diantaranya dalam kondisi rusak (260 km). Dari 3.005 km jalan provinsi, ada 11% diantaranya dalam kondisi rusak (340 km) dan dari 33.000 km jalan kabupaten/kota, ada 39% diantaranya dalam kondisi rusak (13.000 km). Salah satunya ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara. Sementara di wilayah Sumatera Selatan, sekitar 50% ruas jalan dari Palembang ke Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kerusakan, yaitu sepanjang 100 km. Jalan rusak ada di 3 kecamatan, yaitu Pampangan, Pangkalan Lampan, dan Tulung Selapan. Di wilayah Jambi, dari 1.300 jalan nasional, 10% diantaranya rusak (130 km). Kemudian dari 1.030 km jalan provinsi, 25% diantaranya rusak (250 km). Dari 10.000 km jalan kabupaten/kota, hampir 50% jalan rusak (4.600 km). Sedangkan di wilayah Lampung, terdapat 15 ruas jalan rusak.

Truk-truk bermuatan lebih (*overloading*) menjadi faktor penyebab terbesar kerusakan jalan di ruas Lampung-Palembang. Truk-truk dengan roda belakang sedikit tetapi dengan beban yang besar memiliki daya rusak yang tinggi terhadap jalan. Menjaga kualitas jalan sesuai umur rencana dengan pembatasan beban kendaraan yang melintas akan menghemat pengeluaran negara. Mengingat kerusakan jalan terbanyak ada di jalan kabupaten/kota (jalan daerah), maka Pemda perlu melakukan pembatasan muatan kendaraan yang melintas disertai denda bagi yang melanggar.

Kerusakan jalan menimbulkan kerugian. Tanpa alternatif akses yang menghubungkan antardaerah, kerusakan konektivitas mengakibatkan mobilitas masyarakat menjadi terganggu dengan bertambahnya waktu tempuh. Sebagai sentra pertanian dengan hasil utama kopi, sawit, hortikultura, dan jeruk, maka kerusakan jalan ini mendorong semakin mahal biaya angkut akibat bertambahnya kebutuhan bahan bakar minyak. Daya saing produk pertanian menjadi turun. Kondisi ini akan memicu ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan inflasi.

Pemerintah berupaya melakukan perbaikan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil alih perbaikan jalan tersebut dengan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya jalan yang merupakan tanggung jawab Pemda namun minim memiliki kemampuan keuangan. Perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp14,6 triliun akan dimulai bulan Juli 2023, setelah dilakukan pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk ruas jalan di Sumatera Utara, Pemda melalui APBD juga diharapkan perannya untuk bersama-sama pemerintah melakukan perbaikan jalan.

Atensi DPR

Kinerja pemerintah dalam penanganan terhadap buruknya konektivitas/ infrastruktur jalan daerah di Sumatera perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI, karena sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah ini sangat memberikan manfaat dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan mengintegrasikan dengan sentra ekonomi dan membantu pemerataan. Komisi V DPR RI perlu terus memantau pelaksanaan percepatan penanganan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengatasi persoalan perbaikan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah nusantara, dan memprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI juga mendorong pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah agar membenahi persoalan infratraktur jalan yang berkualitas untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi daerah.

Sumber

detik.com, 25 Mei 2023;
Kompas, 24 dan 25 Mei 2023;
pu.go.id, 26 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023